

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021

TENGGARONG, FEBRUARI 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl.AP.Mangkunegoro No.3 Kel.Timbau Telp. (0541) 661009,fax (0541) 661009 Kec. Tenggarong

Website : <http://bpbd.kukarkab.go.id>

E-mail : bpbdkutai@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada kami sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good governance/ yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berkembang secara mandiri setara dengan tingkat kehidupan masyarakat. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami sadar bahwa Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Tenggarong, 25 Februari 2022

Kepala Pelaksana



Drs. H. MARSIDIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19620403 198703 1 020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Executive Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Instansi yang berada di bawah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan bertanggung jawab Kepada Bupati Kutai Kartanegara, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian bantuan kepada seluruh unit organisasi, aparatur pemerintah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Maka dari itu seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara di dasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dari tabel pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator sasaran BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana di segala aspek
			Membangun sistim dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal
			Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	116,69	114	113,49

- a. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan dapat dikatakan Sangat Baik secara kuantitas dan kualitas.

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Pada tahun anggaran 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19.477.572.040,- Pagu Sesudah Perubahan Sebesar Rp 25.433.259.594,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.751.104.100,- atau sebesar 89,45%..

- b. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.230 km² dengan luas perairan 4.097 km² terdiri dari 18 Kecamatan dengan 225 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 696.784 jiwa. Dari 18 kecamatan tersebut 15 kecamatan merupakan wilayah rawan bencana, karena tingginya tingkat kejadian bencana tersebut. 15 kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Tabang. sebagian wilayah masih aman dari rawan bencana dan sebagai wilayah rawan bencana. Sebagian wilayah Kecamatan rawan terhadap Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Lahan, Tanah Longsor, banjir Angin Putting Beliung, Orang Hilang/Tenggalam, Pohon Tumbang, dan Lain-lain. Tercapainya target capaian daerah rawan bencana yang berhasil diturunkan ini tidak terlepas dari upaya BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berbagai upaya pencegahan dini yang dilakukan, serta semakin meningkatnya koordinasi antar lembaga terkait baik secara vertikal maupun horizontal, seperti adanya peran serta TNI/POLRI, SatPol PP, Balakarcana, dan lembaga terkait lainnya, termasuk bantuan dari tiap Pos Kecamatan yg selalu aktif dalam setiap kejadian bencana. Selain itu, tercapainya target indikator ini juga tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pentingnya upaya pencegahan kemungkinan terjadinya bencana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI BPBD KAB. KUKAR	
1. Kedudukan	5
2. Tugas Dan Pokok	6
3. Fungsi	8
4. Struktur.....	8
5. Sumber Daya manusia (SDM).....	11
6. Sarana Dan Prasarana Kantor.....	13
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	16
1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA BPBD	
2.1 RENCANA STRATEGIS	19
2.2 VISI DAN MISI	20
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	21
2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	22
2.5 RENCANA KERJA TAHUNAN.....	22
2.6 INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA	23
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
3.2. REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Takdir menempatkan Indonesia berada dipertemuan tiga lempeng tektonik (Australia, Eurasia dan Pasifik) sehingga pantas dijuluki *Super Market Bencana* (Semua Jenis Bencana Ada). Wajar bila menjadi salah satu Negara yang paling rentan bencana.

Bencana alam maupun nonalam, hari-hari ini sudah menjadi bagian keseharian kita. Revolusi teknologi informs tidak saya mengabarkan kejadian petaka di belahan bumi lain, tetapi dengan video real time, kejadian-kejadian tersebut seakan-akan lekat dan dekat dengan kita. Frekuensi kejadiannya pun tak terbilang, tidak lagi perbulan, per minggu, per hari bahkan per jam tetapi sudah setiap menit dan setiap detik. Bencana menjadi matra sakti hingga membuat public dan berbagai ekemen masyarakat luas makin tahu dan familiar dengan bencana dan juga memnbuat masyarakat panik akan bencana yang terjadi di sekitar mereka. Mungkin, karena bencana selalu membelot nalar kemanusiaan dan mengetuk pintu iba hati setiap insan maka setiap bencaa tak luput dari perhatian kita.

Pada Tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana Nasional Nonalam. Pandemi Covid-19 saat ini telah berdampak pada seluruh kehidupan masyarakat baik aspek kesehatan, ekonomi maupun social. Penanggulangan bencana nonalam Covid-10 telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah, demikian juga dunia usaha dan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senantiasa berupaya untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan segala jenis pelayanan publik yang ada berkaitan dengan Kebencanaan. HI tesebut sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 202/SK- BUP/HK/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 184/SKBUP/HK/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di kabupaten Kutai Kartanegara, danal Struktur Gugus Tugas Tersebut dimana BPBD sebagai sebagai salah satu Sekretaris dan sebagai Koordinator Pusat Pengendalian Operasional.

Tugas Pusat Pengendalian Operasi yaitu :

1. melakukan konsolidasi dan dukungan lintas sektor;
2. pengumpulan dan pengelolaan data (data base);
3. pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan
4. pelaporan.

Kecuali itu dalam struktur Gugus Tugas tersebut BPBD masuk dalam struktur Pencegahan pada bidang Sosialisasi / Edukasi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menjadi bagian dalam Logistik dengan tugas melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi Sumber Daya Daerah (SDD). Demikian penting peran BPBD dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, maka dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 ini difokuskan untuk melakukan survey terkait dengan penanganan pandemic Covid-19 menjadi hal yang lebih urgen untuk dilakukan. Hal ini sebagai salah satu alat ukur capaian kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara umum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Bangsa Indonesia sekarang ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKJIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.

Penyusunan LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah yang menjabat secara rangkap sebagai Kepala Badan. LKjIP ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2021.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggungjawab yang besar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadinya Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.2.1 Kedudukan

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penanggulangan Bencana, Perda No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Perbup Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Penanggulanga Bencana daerah, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BPBD. Kebijakan penanggulangan bencana perlu diakomodasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian

bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktural.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPBD adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai undang-undang mempunyai kewajiban antara lain (a) Melindungi masyarakat...” dan (b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat....“ Di sisi lain undang-undang-undang juga menyatakan bahwa ; (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 22 dan 156; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasinya pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2.2 Tugas Dan Pokok

a. Pra bencana

Pada situasi tidak terjadi bencana, bertugas:

1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang;

4. Melakukan koordinasi Badan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Melakukan koordinasi Badan pemanduan perencanaan pembangunan;
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
7. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana; dan
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana, bertugas melakukan:

1. Mitigasi;
2. Kesiapsiagaan; dan
3. Peringatan Dini

b. Tanggap Darurat

Saat tanggap darurat, bertugas:

- a) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 1. Pencarian dan penyelamatan korban;
 2. Pertolongan darurat; dan
 3. Evakuasi korban dan harta benda.
- b) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 2. Pangan;
 3. Sandang;
 4. Penampungan dan tempat hunian

c. Pasca Bencana

Pasca bencana tugas meliputi;

1. Rehabilitasi;
 - 1) Pendataan
 - 2) Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - 3) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 4) Perbaikan prasana dan sarana umum;
 - 5) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 6) Pemulihan sosial psikologis;
 - 7) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 8) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - 9) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 10) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - 11) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Rekonstruksi

- 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

1.2.3 Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) **PengkoorBadanian**, yang merupakan fungsi koorBadani yang dilaksanakan melalui kegiatan koorBadani dengan SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
- b) **Pengkomandoan**, yang merupakan fungsi komando yang di laksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c) **Pelaksana**, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoorBadani dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

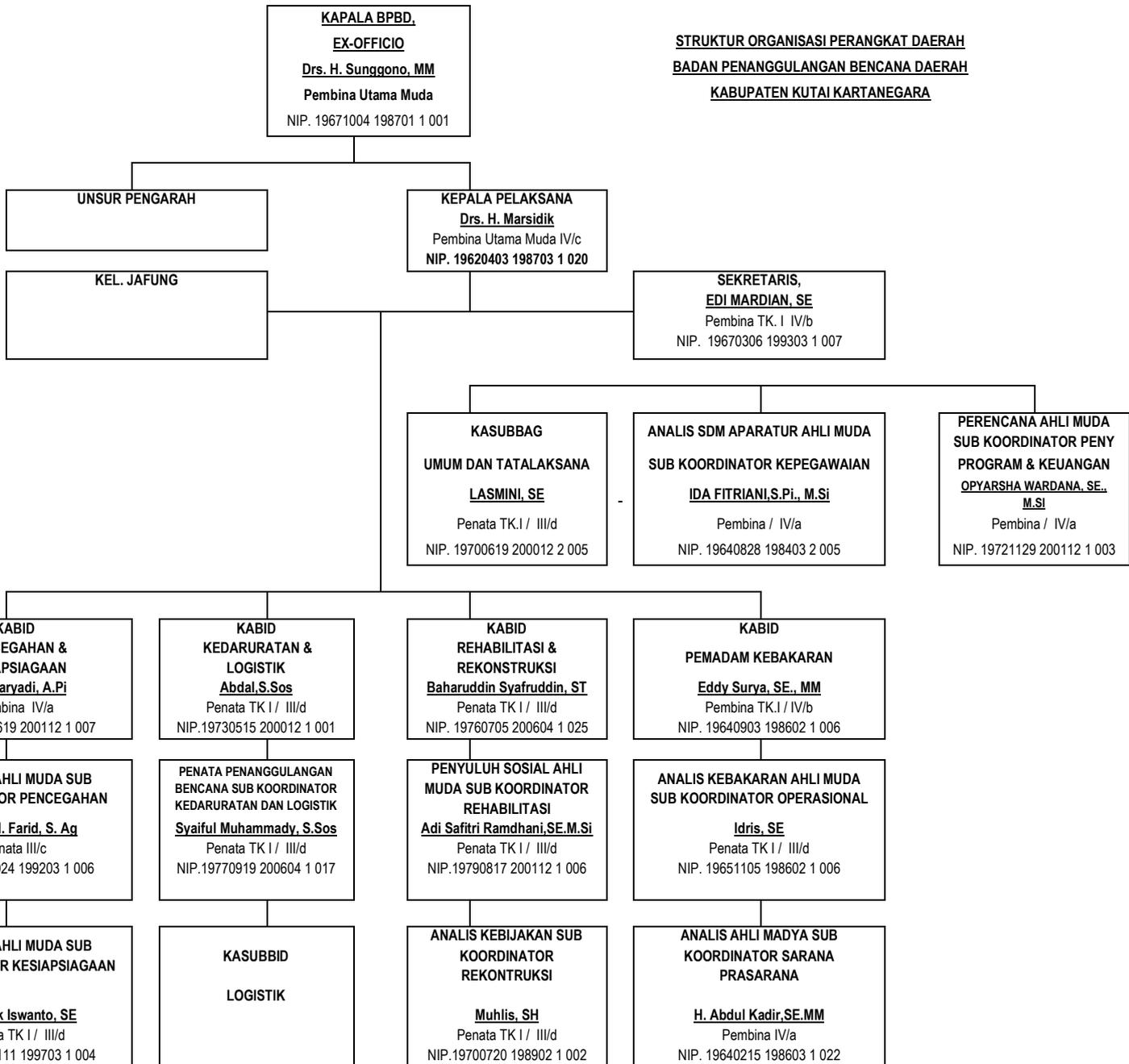
Berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, maka organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabat oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Unsur Pengarah terdiri dari unsur-unsur yang berasal dan mewakili OPD terkait di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian lagi berasal dan mewakili masyarakat profesional yang memiliki kompetensi dan ahli di bidangkebencanaan. Sedang Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD, dengan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a) Kepala Pelaksana ;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan;
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- d) Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 - 2. Sub Bidang Logistik;
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
- f) Kelompok Jabatan fungsional

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :



Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Kartanegara. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBD atas nama Bupati Kutai Kartanegara mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh satu Sekretaris dan empat kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

NO.	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
1.	Pembina Utama	IV/E	-	
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	1 Orang	
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	2 Orang	
5.	Pembina	IV/A	5 Orang	
6.	Penata Tingkat I	III/D	12 Orang	
7.	Penata	III/C	3 Orang	
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	6 Orang	
9.	Penata Muda	III/A	12 Orang	
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	34 Orang	
11.	Pengatur	II/C	24 Orang	
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	8 Orang	
13.	Pengatur Muda	II/A	0 Orang	
14.	Juru Tingkat I	I/D	2 Orang	
15.	Juru	I/C	0 Orang	
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	0 Orang	
17.	Juru Muda	I/A	0 Orang	
JUMLAH			109 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 109 orang Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1.	Doktor	-	
2.	Strata 2 (S2)	5 Orang	
3.	Strata 1 (S1)	28 Orang	
4.	Diploma III	1 Orang	
5.	Diploma II	-	
6.	Diploma I	-	
7.	SLTA/Sederajat	73 Orang	
8.	SLTP/Sederajat	2 Orang	
9.	SD/Sederajat	0 Orang	
	JUMLAH	91 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural

NO.	ESSELON	JUMLAH	KET.
1.	Esselon II/B	1 Orang	Kepala BPBD
2.	Esselon III/A	1 Orang	Sekretaris
3.	Esselon III/B	4 Orang	Kepala Bidang
4.	Esselon IV/A	10 Orang	Kasubbid dan Kasubbid
	JUMLAH	16 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 4. Jumlah Tenaga Honor/THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	32	10	42
4.	Sarjana Muda	3	1	4
5.	SLTA/SMU	152	16	168
6.	SLTP	7	-	7
7.	Sekolah Dasar	3	-	3
	Jumlah	197	27	224

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 5. Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	20	

5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	

Sumber Data : Seksi Diklat

1.2.6 Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki sesuai Tabel berikut :

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Gedung Kantor Badan	2 Buah	Baik
2.	Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	6 Buah	Baik
	JUMLAH	8 Buah	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 8. Sarana dan Prasarana berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik	
2.	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
3.	Mobil Roda 4	19	Baik	
		3	Kurang Baik	
4.	Roda 2	12	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
		1	Kurang Baik	
5.	Mesin Compresor	1	Baik	
6.	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
7.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
8.	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
9.	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
10.	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	
11.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
12.	Lemari Besi	6	Baik	
13.	Rak Besi/Metal	1	Baik	
14.	Filling Kayu	5	Baik	
15.	Brankas	1	Baik	
16.	Lemari Kayu	1	Baik	
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
18.	White Board	1	Kurang Baik	
19.	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
20.	Lemari Kayu	1	Baik	
21.	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
22.	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
23.	Meja Rapat	5	Baik	
24.	Kursi Rapat	101	Baik	
25.	Kasur	1	Baik	
26.	Kasur	14	Rusak Berat	
27.	Tenda	2	Baik	
28.	Sofa	2	Baik	
29.	Jam Elektronik	5	Baik	
30.	Lemari Es	4	Baik	
31.	AC	19	Baik	
32.	AC	1	Kurang Baik	
33.	Kompor Gas	1	Baik	
34.	Tabung Gas	1	Baik	
35.	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
36.	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
37.	Kamera Film	3	Baik	
38.	Alat Hiasan	1	Baik	
39.	Dispenser	1	Baik	
40.	Handycam	1	Rusak Berat	
41.	Handycam	1	Baik	
42.	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
43.	Pompa Kebakaran	2	Baik	
44.	Pipa Pemancar	16	Baik	
45.	Baju Anti Panas	4	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
46.	Masker Gas	60	Baik	
47.	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	
48.	PC / Komputer	6	Baik	
49.	Notebook	10	Baik	
50.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	
51.	Printer	8	Baik	
52.	Monitor	5	Baik	
53.	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
54.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
55.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
56.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
57.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
59.	Proyektor	1	Baik	
60.	UPS	1	Baik	
61.	Handy Talky	1	Baik	
62.	Faxmili	1	Baik	
63.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
64.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
65.	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
66.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
67.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
68.	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
69.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
70.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
71.	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
72.	BCD	6	Baik	
73.	Tabung Scuba	6	Baik	
74.	Baju Scuba	5	Baik	
75.	Regulator	6	Baik	
76.	Sepatu Scuba	5	Baik	
77.	Vines	6	Baik	
78.	Pisau	6	Baik	
79.	Masker	6	Baik	
80.	Senter	6	Baik	
81.	Snorkel	6	Baik	
82.	Slayer	6	Baik	
83.	Sarung Tangan	6	Baik	
84.	Belt	6	Baik	
85.	Weight 4 Kg	5	Baik	
86.	Weight 2 Kg	10	Baik	
87.	Selang Compressor	3	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
88.	Compressor	1	Baik	
89.	FilterCompressor	5	Baik	
90.	Minyak nabati	8	Baik	
91.	Mesin Boat	3	Baik	
92.	Rubber Boat	2	Baik	
		1	Kurang Baik	
93.	Speed Boat dan Mesin	1	1	
94.	Tangki BBM	3	3	
95.	Life Jacket	5	5	
96.	Badan Ces	1	Kurang Baik	
97.	Mesin Ces	1	Baik	
98.	Tenda	2	Baik	
		5	Kurang Baik	
99.	Tali	3	3	
100	Velm Bed	23	Baik	
		1	Kurang Baik	
101	Kantong mayat	21	21	
102	Tandu	1	1	
103	Terpal	9	9	

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat terpenuhi melalui strategi pencapaian (Program dan kegiatan) yang selaras. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2021 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Executive Summary, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama tiga tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memandang bahwa dari sisi manajemen, Renstra dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Gambaran visi, misi persepsi interpretasi serta strategi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan program dan kegiatan.

- Alat untuk memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dalam masa kepemimpinannya adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunansumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggu, Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah; Dan
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui RPJMD 2021-2026, program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah terdiri atas atas 3 (Tiga) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan Visi Organisasi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurung waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan Tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, dapat bersifat kualitatif dan diupayakan terfokus pada suatu peningkatan hasil pembangunan.

Dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah

2.3.2 Sasaran

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sasaran dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Menurunnya Tingkat Risiko Bencana

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”		
MISI	<i>Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat.</i>		
Tujuan	Sasaran	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Kualitas Kepuasan Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana dan kebakaran di segala aspek. Upaya tersebut harus didukung dengan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen baik pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. b. Melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran. 2. Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran yang handal dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat secara melembaga dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, baik dari Instansi Pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun nasional maupun internasional 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam upaya pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat. b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja SDM aparatur yang berkualitas dan professional dalam rangka penanggulangan bencana; 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkualitas kepada masyarakat; 3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas kedaruratan serta rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada koordinasi baik antar SKPD maupun masyarakat dan peningkatan partisipasi stakeholders dalam penanggulangan bencana dan kebakaran pada daerah rawan bencana.

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Adapun program kerja operasional merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja. Program-program tersebut telah ditetapkan di RPJMD, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mengindukkan diri pada program-program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Atas

dasar hal tersebut, serta mengingat tugas dan fungsi, maka program-program operasional yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

No	Program	Indikator
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran
2	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan Penanggulangan Bencana
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Kebaranan dan Non Kebakaran

Program di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.6 INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2016 – 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kutai kartanegara yang akan digunakan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi, serta pemberdayaan masyarakat			
Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 1	Meningkatkan upaya pencegahan dan	Tersedianya perencanaan program dan kegiatan BPBD	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan

URAIAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 2	pengurangan resiko bencana	tersedianya sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur yang menunjang	Jumlah sarana dan prasarana
Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 3			Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat lingkup penanggulangan bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1			Frekuensi koordinasi antar SKPD, Masyarakat dan stakeholder
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2	Mensosialisasikan Upaya-upaya Kesiapsiagaan, Peringatan Dini dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya sosialisasi dan promosi dalam upaya kesiapsiagaan	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kesiapsiagaan
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan kearifan local	Jumlah pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana
Misi 2 : Meningkatkan upaya penanganan dan penanggulangan bencana terhadap korban dan harta benda			
Indikator Kinerja Utama (IKU) 4	Meningkatkan Upaya Penanganan dan Penanggulangan Bencana Dalam Kerangka Tanggap Darurat Bencana	terlaksananya upaya penangan dan penanggulangan bencana melalui upaya tanggap darurat	Persentase upaya penanganan dan penanggulangan bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU) 5		tersusun dan terlaksananya protap (juknis dan juklak) mengenai penanganan bencana dan manajemen logistic	Jumlah Dokumen SOP dan SOG
Indikator Kinerja Utama (IKU)6	Menciptakan Sistem Manajemen Logistik Dan Bantuan Dalam Kondisi Darurat Bencana	Terciptanya sistem manajemen logistik dan bantuan bencana yang terpadu	Persentase peningkatan sistem manajemen logistik
Indikator Kinerja Utama (IKU)7		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban dan masyarakat yang terkena bencana	Persentase distribusi logistik korban bencana
Misi 3 : Meningkatkan upaya pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana			

URAIAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Indikator Kinerja Utama (IKU)8	Meningkatkan Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah dan Masyarakat Pasca Bencana	terlaksananya upaya terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah dan masyarakat pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
Misi 4 : Menguatkan kapasitas kelembagaan dan jaringan kerjasama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana			
Indikator Kinerja Utama (IKU)9	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran	tersusunnya kelengkapan organisasi/kelembagaan Badan (tatalaksana)	Jumlah kajian penataan kelembagaan BPBD
Indikator Kinerja Utama (IKU)10		tersedianya pos penanggulangan bencana di setiap kecamatan	Jumlah pendirian pos penanggulangan bencana di kecamatan

Dari IKU di atas, maka dijabarkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar untuk Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2021. Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana				582.178.840,-
Tersedianya hasil inventarisasi dan identifikasi potensi daerah rawan bencana	Hasil Inventarisasi dan Identifikasi potensi daerah rawan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	471.707.840,-
Terlaksananya pengkajian kebutuhan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	Pengkajian kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	100 %	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	110.471.000,-
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana				1.001.034.000,-
Sigapnya Anggota dalam mengevakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban bencana yang tertangani	100 Kejadian	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	437.748.100,-
Terpenuhinya kebutuhan Dasar korban bencana	Jumlah Paket Bantuan Logistik Dan kebutuhan Dasar korban bencana	100 %	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	563.285.900,-
			Penataan Sistem Dasar	

			Penanggulangan Bencana	191.246.000,-
Tertanggungjawabnya Fasilitas persiapan desa tangguh bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	191.246.000,-
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.059.813.138,-
Tertanggungjawabnya Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian kebakaran dalam daerah	40 Kejadian	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,-
Tertanggungjawabnya Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 Kejadian	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	632.734.400,-
Tersedianya tempat layanan Non Kebakaran	Jumlah layanan pada pos pemadam kebakaran	100%	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	139.500.000,-
Terpenuhi sarana Damkar	Jumlah Sarana peralatan dan perlengkapan Damkar (Stell/Buah)	225 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	671.948.338,-
Terciptanya kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan	Jumlah kerjasama yang diakomodir	4 Laporan	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	215.630.400,-
Investigasi Kejadian Kebakaran				12.895.000,-
Tertanggungjawabnya pengkajian kebutuhan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	Pengkajian kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	1 Kejadian	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12.895.000,-
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran				2.011.775.000,-
Terciptanya koordinasi antar Instansi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM Menghadapi/Mengatasi Bencana	Meningkatkan koordinasi Antar Instansi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM Menghadapi / Mengatasi Bencana	20 Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	525.000.000,-
Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam kebakaran yang di bentuk dan di bina	4 Kelompok	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	200.000.000,-
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran tersedia	240 Unit	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	1.286.775.000,-
JUMLAH				5.858.941.978,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Hakekat LKJIP BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah alat untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. LKJIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimplementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sub sistem.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akuntabilitas kinerja meliputi kinerja keberhasilan dan kegagalan yang tercermin dari hasil indikator kinerja serta adanya informasi dan data bagi kepentingan pembuatan keputusan untuk kegiatan selanjutnya.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis instansi pemerintah. Penilaian keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ✓ 85 s/d 100 : Sangat Berhasil

- ✓ 70 s/d <85 : Berhasil
- ✓ 55 s/d <70 : Cukup Berhasil
- ✓ 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kreteria
1	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	IRB	114	113,49	Sedang

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Keuangan

Untuk melihat lebih jauh hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Format PKK yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana jika dilihat dari hasil prosentase Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari 3 Program menunjukkan persentase sebesar **89,45%**.

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,-	447.058.800,-	99,35%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,-	199.105.000,-	99,55%
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,-	99.244.300,-	99,24%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,-	148.709.500,-	99,14%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.549.234.354,-	10.591.602.407,-	91,71%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.041.131.484,-	9.418.557.407,-	93,80%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.710.000,-	86.602.000,-	99,88%
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1.086.443.000,-	1.086.443.000,-	100,00%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	334.949.870,-	325.808.000,-	97,27%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,-	74.981.000,-	99,97%
8	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	75.000.000,-	74.981.000,-	99,97%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	682.612.300,-	653.352.696,-	95,71%
9	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	10.495.000,-	10.477.000,-	99,83%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	55.000.000,-	55.000.000,-	100,00%
11	Penyediaan Bahan logistik kantor	100.000.000,-	89.464.000,-	89,46%
12	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	34.999.900,-	34.928.000,-	99,79%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	357.117.600,-	356.935.622,-	99,95%

	Konsultasi SKPD			
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	74.999.800,-	66.988.074,-	89,32%
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,-	39.560.000,-	79,12%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.481.804.592,-	1.385.484.007	93,50%
16	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1.481.804.592,-	1.385.484.007,-	93,50%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.158.561.370,-	4.043.783.668,-	97,24%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	297.326.416,-	219.862.803,-	73,95%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.861.234.954,-	3.823.920.865,-	99,03%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.190.000.000,-	1.163.617.462,-	97,78%
19	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.000.000.000,-	979.699.462,-	97,97%
20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	105.000.000,-	105.000.000,-	100,00%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	85.000.000,-	78.918.000,-	92,84%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
H	Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	582.178.840,-	579.305.776,-	99,51%
22	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	471.707.840,-	470.525.776,-	99,75%
23	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	110.471.000,-	108.780.000,-	98,47%
I	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1.001.034.000,-	928.346.554,-	92,74%
24	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	437.748.100,-	414.548.200,-	94,70%
25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	563.285.900,-	513.798.354,-	91,21%
J	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	191.246.000,-	134.504.000,-	70,33%
26	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	191.246.000,-	134.504.000,-	70,33%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
K	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.059.813.138,-	1.362.647.090,-	66,15%
27	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,-	42.364.000,-	10,59%
28	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	632.734.400,-	400.034.090,-	63,22%
29	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan	139.500.000,-	60.838.000	43,61%

	dan Evakuasi			
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	671.948.338,-	650.828.700,-	96,86%
31	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	215.630.400,-	208.582.300,-	96,73%
L	Investigasi Kejadian Kebakaran	12.895.000,-	12.895.000,-	100,00%
32	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12.895.000,-	12.895.000,-	100,00%
M	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	2.011.775.000,-	1.386.420.640,-	68,92%
33	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	525.000.000,-	42.113.800,-	8,02%
34	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	200.000.000,-	119.660.500,-	59,83%
35	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	1.286.775.000,-	1.224.646.340,-	95,17%
	JUMLAH	25.433.259.594,-	22.751.104.100,-	89,45%

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai salah satu upaya pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (tahun 2020). Dari tabel pencapaian realisasi keuangan tahun 2020, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar **79,42%**, realisasi anggaran Tahun 2021 **89,45%** ini merupakan adanya peningkatan penyerapan anggaran yang telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian pula dengan perbandingan pencapaian *outcome* Tahun 2021 dengan pencapaian *outcome* 2021 terhadap sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten kutai kartanegara. dari perbandingan tersebut dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran pada Tahun 2021 masih lebih baik daripada tahun 2020.

perbandingan yang cukup signifikan ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Semakin baiknya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.
2. Hampir sepenuhnya pengukuran kinerja pada Tahun 2021 di karena adanya penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Perda

Penanggulangan Bencana seperti beberapa target sasaran masih bersifat output dan tidak semua sasaran memiliki target yang jelas (sulit diukur) serta terlalu banyaknya sasaran yang ingin dicapai.

3. Dengan kondisi ketidaksempurnaan Renstra tersebut, maka penetapan renja tidak berdasarkan dokumen perencanaan yang seharusnya. Dan kondisi ini juga mempengaruhi pengukuran kinerja output dan outcome menjadi tidak jelas dan tidak dapat mereprestasikan kinerja yang sesungguhnya.
4. Tahun 2021 hingga sekarang kita di hadapi dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimana kita tidak bisa bebas seperti tahun-tahun yang lalu.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19.477.572.040,- Pagu Sesudah Perubahan Sebesar Rp 25.433.259.594,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.751.104.100,- atau sebesar 89,45%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran			
		Pagu Dana (Rp)	Pagu Dana (Rp) Sesudah Perubahan	Realisasi Keuangan	
				(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.559.578.340,-	19.587.212.616,-	18.359.880.040,-	93,73%
2	Program Penanggulangan Bencana	1.229.822.700,-	1.774.458.840,-	1.642.156.330,-	92,54%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.688.171.000,-	4.084.483.138,-	2.761.962.730,-	67,62%
	JUMLAH	19.477.572.040,-	25.433.259.594,-	22.751.104.100,-	89,45%

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke-4 dari Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 telah terlaksana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dapat dilihat dari 3 Program 35 kegiatan yang ada.

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan serta kerja sama antara Kepala Pelaksana, Kabid, Subbid, Subbag, Satgas Pemadam, Satgas SAR serta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang semakin kondusif.

Dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kerjasama Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia Usaha untuk menjaga Keamanan , Ketertiban Dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan Pencegahan, Pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana
3. Tersedianya Pos Penanggulangan Bencana di Setiap Kecamatan
4. Terwujudnya Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana
5. Tersedianya Hunian Sementara Korban Bencana atau Pasca Bencana
6. Tersedianya Alat Deteksi Dini Bencana
7. Tersediannya Sarana Dan Prasarana Umum Kedaruratan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Korban Bencana/ Kecelakaan
8. Berdirinya PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)

